

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
DALAM MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA
PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

Oleh: Mohammad Maiwan*

ABSTRACT

This study aims to analyze of the foreign policy of Indonesia in realizing the axis of maritime world under the President Joko Widodo. The method used is descriptive analysis with qualitative approach. The result of study shows that Indonesia foreign policy in realizing axis maritime is based on factual and strategic aspects. The strategy pursued by the government is through maritime diplomacy in the form of maritime economic and maritime defense diplomacy. Other than that efforts to realize the axis maritime is done through enhanced regional cooperation and participation in regional, multilateral, and global forums. The policy is integrally followed by the development of the maritime sectors that includes; strengthening connectivity, the development of local and coastal economic, blue and marine economic, fisheries sea transportation, and maritime industry.

Keywords: Foreign policy, diplomacy, axis maritime.

*Dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.000 pulau lebih dengan garis pantai ribuan kilometer yang merentang dari Sabang di bagian Barat sampai dengan Merauke di bagian Timur Indonesia. Wilayah ini dihuni oleh 700 lebih suku bangsa serta kurang lebih 1.100 bahasa daerah yang digunakan penduduknya di serata wilayah tersebut. Selain itu, Indonesia berada pada posisi geografis yang strategis di jalur perairan dunia yang menghubungkan antara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Posisi sebagai titik simpul perhubungan itu menempatkan Indonesia selalu berada di bawah medan pengaruh kekuatan-kekuatan dunia yang saling berinteraksi. Keadaan tersebut memberikan dampak dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya bangsa, yang secara otomatis mempengaruhi dinamika kehidupan nasional kita.

Di samping posisi strategis yang dimiliki, kawasan maritim Indonesia memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang sangat besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Orientasi pembangunan nasional yang selama ini lebih bertumpu pada aspek wilayah daratan perlu digeser dengan memfokuskan perhatian pada dimensi kelautan yang belum ditangani secara maksimal. Dalam kaitan ini usaha

pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan gagasan poros maritim perlu didukung penuh. Gagasan ini membawa implikasi-implikasi serius terkait dengan kemampuan sumberdaya kita, baik kualitas manusia, teknologi, militer, ekonomi, dan diplomasi. Selain itu, usaha untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan berhadapan dengan kekuatan negara-negara adidaya seperti, Amerika Serikat, China, Rusia, India dan lain-lain yang memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa dominasi dan pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara tidak tergugat.

Salah satu langkah penting yang ditempuh pemerintah adalah melakukan diplomasi ofensif untuk menegaskan independensi dan kedaulatan kita serta bertindak tegas dalam melindungi seluruh wilayah perairan Indonesia beserta seluruh sumberdaya alam di dalamnya. Dalam konteks ini, perlu adanya rancang bangun kebijakan politik luar negeri yang jelas dan terarah yang berorientasi pada dimensi kemaritiman.. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini? Apalangkah-langkah yang ditempuhnya serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?

Perspektif Historis

Secara historis usaha-usaha yang menumpukan perhatian pada kekuatan laut telah dilakukan berbagai kekuatan yang pernah muncul di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya misalnya pernah mengalami kejayaan sebagai negara maritim yang bersandar pada pelayaran dan perdagangan. Sebagai kerajaan bahari yang utama pada masa itu Sriwijaya berhasil melakukan ekspansi politik dan ekonomi yang didukung oleh armada laut yang cukup. Bahkan kerajaan tersebut juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Budha. Kerajaan ini tumbuh dengan pesat menjadi penguasa utama di jalur perdagangan laut dengan menguasai jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional (Wolters 1970)..

Pada gilirannya di abad ke 13 kerajaan Majapahit tampil sebagai kekuatan yang mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan bertumpu pada dimensi maritim. Meskipun mula-mula Majapahit merupakan suatu kerajaan agraris, tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan tersebut mampu membangun armada maritimnya dan melakukan ekspansi ke sejumlah wilayah. Melalui armada laut yang kuat kekuasaan Majapahit membentang dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke Sumatera dan

Semenanjung Melayu. Kerajaan ini berkembang menjadi kekuatan maritim terbesar setelah Sriwijaya, dan menjadi pusat perdagangan Asia. Beberapa pelabuhan penting seperti: Gresik, Tuban, Jepara, dan lain-lain berkembang sebagai pusat perdagangan komoditas yang menghubungkan berbagai wilayah di seluruh Nusantara serta bangsa-bangsa dari kawasan Asia lainnya (Reid 1994).

Surutnya kekuasaan Majapahit kemudian digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam, seperti: Demak, Aceh, Ternae, Tidore, Makassar, Banten, Mataram Islam, dan lain-lain. Tersebarnya pengaruh agama Islam serta pelembagaan politik Islam dalam bentuk tatanan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari dimensi maritim dan perdagangan. Para pedagang Muslim, baik dari Arab maupun Gujarat melalui aktivitas perdagangan yang mereka lakukan secara bersamaan juga menyebarkan agama tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, kehadiran kekuatan kolonial Eropa di Nusantara turut memberikan pengaruh bagi pasang surut kehidupan maritim Nusantara. Persaingan antara kekuatan-kekuatan, Belanda, Portugis, dan Inggris di Asia Tenggara mencetuskan serangkaian pergolakan politik yang berujung kepada penguasaan ekonomi dan politik. Bermula dari jatuhnya Kota Malaka sebagai pusat perdagangan internasional di Semenanjung

Melayu oleh Portugis pada abad ke 16, kekuatan kolonial secara terus menerus mendesak para penguasa dan pedagang-pedagang Nusantara untuk mematuhi serangkaian kebijakan-kebijakan mereka. Akibatnya dunia maritim Nusantara mengalami kemunduran (Reid 1993).

Masa surut terendah kehidupan maritim Nusantara dialami setelah masuknya VOC ke Indonesia (1602-1798). Salah satu peristiwa bersejarah yang menandai hilangnya kejayaan budaya bahari Nusantara adalah ditandatanganinya naskah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 oleh pihak Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta. Salah satu inti Perjanjian Giyanti tersebut adalah dictum bahwa kedua raja keturunan Mataram tersebut menyerahkan perdagangan hasil laut, hasil bumi, dan rempah-rempah di wilayahnya kepada Belanda. Keputusan kedua raja yang telah dikendalikan oleh otoritas Belanda tersebut akhirnya memasung perkembangan budaya bahari Nusantara. Akibat yang lebih fatal adalah terjadinya proses penurunan semangat dan jiwa bahari bangsa Indonesia serta pergeseran nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia yang semula bercirikan budaya maritim menjadi bergeser kepada budaya territorial.

Peminggiran terhadap “dunia laut” tersebut berkembang, sehingga Indonesia merdeka. Perhatian pada aspek tersebut

secara serius baru muncul pada tahun 1957 ketika Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno berkuasa. Kebangkitan bahari pada masa itu ditandai dengan adanya deklarasi tentang konsep Wawasan Nusantara di bawah Perdana Menteri Juanda Kartawidjaja. Inti dari Wawasan Nusantara adalah bahwa wawasan kebangsaan bangsa Indonesia diteguhkan berdasarkan asas sebagai “Negara Nusantara” (*archipelagic state*). Wawasan Nusantara memandang wilayah laut merupakan satu keutuhan dengan wilayah darat, udara, dasar laut, dan tanah yang ada di bawahnya serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak bisa dipisah-pisahkan (Butcher and Elson 2017: 31-34).

Untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional tentang konsep “Negara Nusantara” pada masa pemerintahan Presiden Suharto telah dilaksanakan perjuangan diplomatis yang sangat gencar serta berkelanjutan, baik di forum intrnasional maupu regional. Hasilnya adalah, pada tahun 1982 gagasan mengenai “Negara Nusantara” terebut berhasil mendapatkan pengakuan secara internasional, tepatnya dalam forum konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 (UNCLOS 82) serta berlaku efektif sebagai hukum internasional positif sejak tanggal 16 November 1984 (Djoko Pramono 2005: 8).

Akan tetapi pada masa ini hampir semua armada perdagangan laut dikuasai bangsa asing. Muatan dalam negeri terus merosot sampai hanya 47% dari muatan ekspor-impor 96%, pangsa pasar semakin dikuasai kapal asing sejak tahun 1998. Kebijakan pemerintahan Orde Baru tidak mendukung pelaut-pelaut Nusantara untuk mampu berkompetisi dengan bangsa asing, sehingga wajar saja apabila mengalami deficit hampir setiap tahun. Karena itu, gerakan reformasi yang muncul tahun 1998 turut menyadarkan kalangan elite politik untuk memberdayakan potensi laut dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan di tengah hingar bingar reformasi itu juga muncul cita-cita untuk mewujudkan satu Indonesia baru sebagai negara bahari yang kokoh.

Secara berkesinambungan, pasca runtuhnya rejim Orde Baru tahun 1998 usaha-usaha untuk mengembangkan kebaharian Nusantara terus dilakukan, sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sampai dengan Presiden Joko Widodo sekarang ini. Masing-masing presiden memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya kedudukan Indonesia sebagai negara bahari. Akan tetapi perhatian yang lebih besar, serius dan fokus baru ada pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini, di mana usaha-usaha untuk mengembangkan

Indonesia sebagai negara maritim dengan segala potensi yang ada diterjemahkan dalam satu konsep tentang perlunya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Konsep tersebut meletakkan Indonesia sebagai titik pusat dan jalur maritim utama dunia, yang mempertemukan segala kepentingan negara.

Tinjauan Teoritik

Dalam penelitian ini, politik luar negeri dalam mewujudkan poros maritim dunia perlu dikaji berdasarkan kerangka analisis yang tepat. Sejauh ini, kajian tentang analisa politik luar negeri merupakan salah satu kajian penting dan menantang dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Banyak karya para sarjana yang memberikan kontribusi untuk pengembangan pengetahuan dalam studi kebijakan luar negeri, sehingga melahirkan beberapa perspektif dalam analisa politik luar negeri. Beberapa perspektif itu adalah: *Pertama*, perspektif individual.

Dalam perspektif ini diasumsikan bahwa pembuat keputusan kebijakan luar negeri adalah aktor individual, dan seperti semua individu lainnya, mereka juga dibatasi oleh pikiran serta perasaan pribadi. Oleh karena itu karakteristik individual dari pembuat keputusan seperti keyakinan, pengalaman, emosi, serta konsep tentang diri dan bangsa, dapat berdampak signifikan pada pembuatan

keputusan atau kebijakan luar negeri, sehingga menghasilkan format politik luar negeri tertentu. Efek ini mungkin lebih besar dalam situasi tertentu, seperti semasa krisis saat individu harus mengambil keputusan dalam keadaan stress dan tekanan waktu dan mungkin dengan informasi yang terbatas.

Riset tentang karakteristik pemimpin memanfaatkan pengetahuan dari bidang psikologi. Jervis (2005) misalnya mengilustrasikan arti penting faktor psikologis dalam penelitiannya tentang dampak mispersepsi di dalam kebijakan luar negeri. Demikian pula Vertzberger (2008) meneliti dampak pemrosesan informasi terhadap pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Berbagai macam karyalain yang berasal dari pendekatan psikologis menggunakan asumsi bahwa mempelajari kepemimpinan politik dapat memberikan banyak hal untuk menjelaskan kebijakan luar negeri.

Kedua, adalah pendekatan kelompok. Dalam perspektif ini dinyatakan bahwa pembuat keputusan individual sering berinteraksi dengan individu lain saat keputusan kebijakan luar negeri sedang dirumuskan. Interaksi ini mungkin terjadi dalam kelompok kecil atau besar tetapi selalu dalam *setting* tertentu yang dibuat secara sengaja atau tidak. Oleh karena itu, struktur kelompok individu dan proses pembuat keputusan di

sana menjadi perhatian para ahli kebijakan luar negeri.

Dalam hal ini misalnya, Kaarbo (1998), Ozkececi-Taner (2005) mempelajari dinamika pembuatan keputusan kabinet koalisi dalam sistem parlemen. Mereka menyatakan bahwa individu dalam *setting* kelompok berusaha untuk selaras dengan pihak lain --yang mendistorsi pengambilan keputusan dengan cara mereduksi alternatif yang dibahas atau membawa kelompok ke interpretasi yang keliru atas realitas.

Studi dinamika pembuatan keputusan dalam kelompok besar dan kecil juga memanfaatkan bidang psikologi dan masih menarik sarjana bidang kebijakan luar negeri untuk melakukan riset lebih lanjut tentang efeknya pada pembuatan keputusan luar negeri. Karya ini misalnya adalah buku *Victims of Groupthink* oleh Janis (1972). Dalam buku tersebut Janis mengilustrasikan bahwa kelompok kecil pengambil keputusan cenderung mengabaikan, menyalahafsirkan, atau bahkan menolak informasi baru guna menghindari kontroversi atau menghindari retaknya keutuhan di dalam kelompok. Selama tahun 1990-an karya kajian atas topik ini mengeksplorasi apa yang terjadi di luar *groupthink* (Hart, Stern, & Sundelius, 1997).

Perkembangan terbaru juga membangkitkan kembali minat pada

model politik birokratis (BPM). Secara spesifik, pembuatan kebijakan pasca 11 September 2001 dan bulan-bulan sesudahnya hingga ke Perang Irak 2003 selama administrasi George W. Bush telah menarik banyak perhatian. Beberapa studi mendiskusikan sifat kompetitif dan fraksional dari pembuatan keputusan di dalam administrasi Amerika Serikat.

Dalam risetnya tentang pengaruh minoritas terhadap keputusan kebijakan luar negeri oleh pemerintah koalisi, Kaarbo (1998:22) mengemukakan manfaat dari perspektif ini (pembagian kekuasaan, pengambilan keputusan kompetitif) dan menyatakan bahwa model tersebut (prediksi dan asumsinya) mungkin menurun. Secara keseluruhan, alasan terakhir masih adanya BPM dalam studi kebijakan luar negeri mungkin adalah karena model itu sederhana, masuk akal, dan logis (Rhodes 1994: 4)

Ketiga, pendekatan masyarakat. Pendekatan ini memandang bahwa di luar level individu dan kelompok, kebijakan luar negeri adalah penelitian yang ada di level masyarakat. Menurut Kaarbo (2002), kultur dapat merupakan unsur signifikan pada proses pengambilan keputusan. Konteks historis, sosio ekonomi dan politik suatu masyarakat dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Sumber-sumber sosial dari kebijakan luar negeri bisa mulai dari kultur

dan identitas hingga ke opini elite dan publik.

Studi kultur yang berkaitan dengan analisa kebijakan luar negeri adalah penelitian yang ada di level masyarakat. Menurut Kaarbo (2002:12) kultur dapat merupakan seperangkat parameter (yang luas) untuk kebijakan luar negeri. Misalnya, karakteristik kultural dari suatu masyarakat dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks politik luar negeri Indonesia, ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis sejauh mana proses-proses perumusan dan penentuan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Wujudnya kekuasaan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen kuat terhadap dimensi maritim tidaklah berlangsung sendirian, tetapi dipengaruhi berbagai isu, kelompok, faksi, serta pergeseran-pergeseran dalam peta politik global.

Munculnya kelompok-kelompok baru dalam tubuh pemerintahan dan juga lembaga negara, telah membawa efek pada proses pembuatan keputusan. Berkurangnya pengaruh militer dalam politik dan pemerintahan, menguatnya institusi parlemen, tumbuhnya partai-partai politik, serta kuatnya peran birokrasi

khususnya kementerian Luar Negeri dalam pengambilan kebijakan dapat dijadikan alat pemahaman ke atas analisa kebijakan politik luar negeri pada era sekarang ini.

Meskipun studi terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia telah dilakukan sejumlah pakar seperti; Weinstein (1976), Leifer (1989); Leo Suryadinata (1998), Rizal Sukma (2003), Ganewati Wuryandari (2008) dan lain-lain, namun kajian khusus terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia belum terlalu banyak dilakukan. Sekiranya ada, sepengetahuan penulis, masih bersifat penjajagan dan penilaian yang bersifat tentatif.

Gagasan Poros Maritim Dalam Kebijakan Luar Negeri

Penjelasan tentang gagasan poros maritim perlu diletakkan dalam konteks kecenderungan kebijakan luar negeri Indonesia dalam beberapa dekade belakangan. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pasca Orde Baru dapat dilihat terkait dengan kemunculan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan luar negeri. Munculnya aktor-aktor ini pada kenyataannya mempengaruhi konfigurasi struktur penentuan kebijakan dan pola atau gaya diplomasi yang dimainkan oleh kepala pemerintahan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri

Indonesia pasca Orde Baru kental dengan pelibatan aktor-aktor negara yang meluas secara horizontal dan vertikal serta aktor-aktor non-negara. Keberadaan aktor-aktor tersebut bagaimanapun telah ikut mendinamisasikan proses pelaksanaan politik luar negeri. Secara nyata, aktor-aktor horizontal meliputi pemerintah pusat dengan jajaran kementerian dan legislatif serta aktor vertikal yang mencakup pemerintah daerah. Adapun aktor-aktor non-negara mencakup lembaga internasional, NGO atau LSM nasional serta masyarakat sipil. Seiring dengan makin meluasnya segi-segi kehidupan masyarakat, faktor-faktor tersebut tidak bisa dielakkan sama sekali.

Kita dapat memahami kebijakan tersebut mengingat dunia perpolitikan pasca Perang Dingin yang tidak menentu sehingga menjadikan tugas penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, tidak mudah dan lebih kompleks. Pemerintah menghadapi bukan hanya isu-isu tradisional, melainkan juga isu-isu non-tradisional, seperti demokrasi dan HAM, lingkungan hidup, keamanan energi, dan kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas negara. Isu-isu semacam itu kini menjadi kecenderungan baru yang memiliki dampak politik yang amat luas, sehingga menjadi keprihatinan bersama. Kondisi eksternal tersebut juga didukung

oleh proses demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru.

Iklim keterbukaan sebagai ciri utama era demokrasi memberikan kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkiprah dalam perpolitikan nasional dan internasional. Selain itu, negara secara sendirian tidak akan mampu menangani berbagai persoalan yang sebelumnya tidak menjadi fokus perhatian global. Oleh karena itu, proses demokratisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal, telah mendorong keterbukaan ruang bagi banyak aktor, baik negara maupun non-negara untuk mengambil peran lebih luas dalam merespon isu-isu internasional. Dengan kata lain, pemerintahan yang demokratis telah memberikan “panggung” bagi hadirnya pelaku-pelaku politik luar negeri yang lebih luas.

Pada kenyataannya, proses demokratisasi berpengaruh dalam menentukan orientasi atau arah kebijakan luar negeri Indonesia pasca Orde Baru. Pada masa ini, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia bercirikan dua hal, yakni: Berorientasi ke “Barat” dalam upaya pemulihan ekonomi, dan reorientasi posisi Indonesia di ASEAN. Pemerintahan pasca Orde Baru, mulai dari Presiden Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meletakkan agenda pemulihan ekonomi sebagai komponen utama yang

mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini penting mengingat perekonomian Indonesia pada akhir tahun 1990-an berada dalam posisi kritis. Kinerja perekonomian Indonesia yang relatif baik selama lebih dari dua dekade mengalami penurunan drastik dan tragis karena krisis moneter. Situasi ini semakin memanas seiring dengan tuntutan rakyat Indonesia agar Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Pemerintahan Orde Baru yang otoriter dinilai tidak mampu mengatasi persoalan sosial ekonomi pada saat itu. Situasi ini seakan mengonfirmasi argumen Huntington bahwa rezim otoritarian akan melemah seiring dengan terjadinya krisis ekonomi sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang kuat (Huntington 2001).

Sementara itu pada era Presiden Joko Widodo sekarang ini usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam negeri dengan menggenjot pembangunan infrastruktur secara besar-besaran telah menempatkan Indonesia untuk menoleh pada negara-negara asing, khususnya negara-negara Barat. Meskipun Presiden Joko Widodo juga berusaha menarik investasi bagi pengembangan ekonomi dengan mendekati Tiongkok, namun perhatian besarnya tetaplah tertumpu pada negara-negara Barat. Hal tersebut misalnya ditandai dengan intensitas kunjungan presiden ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

Pada masa pemerintah Joko Widodo tekanan juga diberikan pada cita-cita pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Meskipun demikian, ide tersebut belum memiliki arah dan strategi serta penjabaran yang jelas. Usaha untuk menjadikan Indonesia untuk menjadi poros maritim merupakan gagasan besar yang perlu dukungan dana, sumberdaya, serta perencanaan yang jelas. Selain itu, ide tersebut juga harus memperhitungkan posisi politis negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di jalur Samudera Hindia dan Laut China Selatan.

Diplomasi Maritim

Strategi politik luar negeri yang ditempuh untuk mewujudkan poros maritim dilakukan dengan menggunakan diplomasi maritim. Dalam kaitan ini Indonesia telah mengembangkan bentuk-bentuk baru diplomasi maritim agar dapat menempatkan diri secara signifikan di antara kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. Biasanya diplomasi maritim dipandang secara tradisional sebagai yang dilakukan oleh angkatan laut. Dalam konteks diplomasi maritim ini Indonesia ingin memiliki kepemimpinan dalam berbagai isu maritim di kawasan. Keaktifan Indonesia dalam keamanan maritim di kawasan dan di wilayah-wilayah yang jauh serta diplomasi ekonomi maritim bisa diolah untuk

peningkatan kepemimpinan Indonesia di kawasan. Dalam kebijakan tentang kelautan yang baru saja dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Indonesia menyatakan dirinya memiliki kepentingan domestik dan eksternal. Dimensi eksternal adalah bagaimana kita dapat berperan di kawasan.

Terlepas dari adanya berbagai masalah yang selama ini muncul seperti; klaim wilayah dan perbatasan kawasan Laut China Selatan dan Laut China Timur merupakan wilayah perdagangan yang paling sibuk. Kita harus menghindari adanya hegemoni di kawasan ini. Perlu ada suatu pendekatan yang menguntungkan semua pihak. Dalam konteks usaha untuk memenangkan kampanye doktrin poros maritim Presiden Joko Widodo, ada dua bentuk diplomasi yang telah ditempuh. Pertama adalah diplomasi ekonomi maritim. Kedua, diplomasi pertahanan maritim.

Diplomasi ekonomi maritim merupakan penegasan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara maritim dengan menempatkan sektor kelautan menjadi sentral kehidupan bangsa dalam mengembangkan segala potensinya. Salah satu sasaran diplomasi ini adalah mendorong kerjasama internasional yang dapat mendayagunakan segenap potensi “rumah kepulauan” Indonesia secara dinamis. Melalui

diplomasi ekonomi maritim Indonesia berkesempatan lebih besar untuk memproyeksikan diri sebagai bangsa yang disegani. Dalam konteks ini Indonesia menempatkan laut-laut di Nusantara sebagai suatu keunggulan komparatif dan kompetitif dalam melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Potensi nilai total ekonomi sektor kelautan yang menncapai 1 trilliun dollar AS tentu merupakan suatu modal yang lebih dari cukup untuk melaksanakan diplomasi ekonomi maritim.

Untuk kepentingan tersebut diplomasi ekonomi maritim diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kongkrit yang mengkonsolidasikan semua kerjasama internasional yang dapat mendorong pemanfaatan semua potensi dan kekayaan laut. Mengingat sektor perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi nasional, diplomasi ekonomi perlu menekankan pada upaya peningkatan nilai tambah sektor perikanan Indonesia. Di samping fokus pada upaya pencegahan penjarahan hasil laut, khususnya pencurian ikan secara ilegal, pemerintah telah merumuskan suatu strategi khusus untuk menembus pasar bagi ekspor perikanan ke negara-negara lain, khususnya negara Barat. Selain memprioritaskan pemanfaatan hasil kelautan, diplomasi ekonomi maritim diharapkan dapat mendorong penguatan investasi asing

yang dapat menunjang pembangunan di bidang kelautan maupun meningkatkan daya dukung infrastruktur kelautan untuk memanfaatkan sumberdaya laut secara baik. Menarik investasi di bidang transportasi, pelabuhan, komunikasi, pertambangan, dan pengembangan energi alternatif di sektor kelautan akan menjadi salah satu sasaran utama diplomasi ekonomi maritim.

Sementara diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk diplomasi untuk menghadapi ancaman tradisional dan nontradisional di kawasan maritim. Diplomasi pertahanan maritim merupakan langkah mencapai tujuan-tujuan pertahanan maritim –mulai dari keamanan dan keselamatan di laut hingga peredaan ketegangan dan stabilitas tatanan kawasan- - melalui integrasi dan optimalisasi sejumlah instrumen diplomatik, hukum, dan militer (maritim), baik dalam keadaan damai, krisis maupun perang. Diplomasi pertahanan maritim merupakan bagian dari penguatan dimensi eksternal yang sangat penting dalam mengimplementasikan doktrin poros maritim dunia. Strategi diplomasi ini mencakup tiga elemen dasar (diplomasi, pertahanan, maritim), di mana pelaksanaannya bersifat lintas kementerian.

Meskipunn jauh sebelumnya, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru kita telah menjalankan diplomasi ini

melalui berbagai bentuk kegiatan, namun kebanyakan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terpadu. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah dimulai penataan strategi diplomasi pertahanan maritim yang lebih terpadu dan komprehensif. Sejumlah kegiatan berikut dapat dikategorikan sebagai lingkup diplomasi pertahanan maritim, yakni: (1) kerjasama bilateral dengan negara mitra strategis; (2) kerjasama multilateral, baik dalam kerangka ASEAN maupun nonASEAN; (3) pengadopsian hukum internasional dan konvensi regional tentang keamanan dan maritim, serta (4) sejumlah latihan dan operasi keamanan laut bersama (Febrica 2017: 46-48).

Beberapa kegiatan di atas telah dijalankan pemerintah Indonesia yang melibatkan terutama negara-negara ASEAN. Namun demikian sejauh ini bentuk-bentuk kegiatan diplomasi pertahanan maritim di atas sebagian besar diformulasikan dalam situasi damai. Sebagai contoh, secara multilateral Indonesia terlibat aktif dalam paling tidak 25 forum-forum maritim yang berada dalam naungan ASEAN, namun sebagian besar dari forum ini hanya baru berjalan beberapa kali dan belum secara rutin ataupun melembaga. Pada kenyataannya forum-forum multilateral maritim ini lebih bersifat sukarela dan informal serta mencakup isu-isu yang cenderung butuh

waktu lama untuk punya dampak strategis.. Ketimpangan ini dapat dimaklumi mengingat hakikat kerjasama multilateral yang selalu berusaha mengakomodasi kepentingan banyak negara. Meskipun demikian, efektivitas diplomasi pertahanan maritim hanya dapat dirasakan manfaatnya apabila ada proses pelembagaan yang dapat digunakan untuk memobilisasi sumberdaya bersama dalam menghadapi persoalan maritim terkini.

Sejauh ini dalam konteks diplomasi pertahanan maritim Indonesia belum secara maksimal memformulasikan dan mengembangkan instrumen-instrumen krisis maritim seperti yang kita lihat dalam berbagai insiden dengan China beberapa tahun ini. Absennya sejumlah persiapan krisis atau kemungkinan konflik bersenjata di laut ini menjadi bukti kelemahan Indonesia dalam menghasilkan strategi inovatif dan preventif dalam persoalan Laut China Selatan. Dengan kata lain, peningkatan kegiatan diplomasi pertahanan maritim perlu dibarengi dengan pengembangan sistem manajemen krisis, agar kita dapat lebih gesit dan fleksibel dalam mengerahkan kekuatan. Apalagi terlihat bahwa dalam beberapa tahun ini kita menghadapi tantangan strategis dalam aspek keamanan laut, mulai dari kasus penculikan WNI di perairan Filipina, masuknya sejumlah teroris melalui wilayah laut di Kalimantan dan Sulawesi,

pencurian ikan secara illegal, ketegangan dengan China menyangkut sengketa Laut China Selatan, masuknya penyelundupan narkotika serta barang-barang terlarang lain melalui wilayah perairan Indonesia.

Peningkatan Kerjasama Regional

Dalam konteks untuk memperkuat implementasi gagasan poros maritim dunia, Indonesia telah menggalang dukungan dari negara-negara kawasan terdekat, khususnya ASEAN. Kebijakan luar negeri Indonesia menempatkan ASEAN sebagai ring terdalam lingkaran konsentris, yang bukan semata-mata karena kedekatan wilayahnya saja, tetapi juga fakta bahwa organisasi ASEAN selama ini telah mampu bertahan sebagai organisasi yang solid dan memberi kontribusi dalam mewujudkan stabilitas kawasan. Tanpa adanya dukungan kerjasama dari negara-negara ASEAN, maka agak sukar kiranya bagi Indonesia untuk mewujudkan konsep poros maritim tersebut. Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara Indonesia memiliki posisi sentral serta daya tawar cukup tinggi. Untuk itu, setelah dilantik secara resmi, Presiden Joko Widodo, melakukan lawatan pertamanya ke sejumlah negara-negara anggota ASEAN sebagai bagian dari tradisi pengenalan pemimpin baru di negara-negara ASEAN, sekaligus ajang untuk menyampaikan

kebijakan-kebijakan baru menyangkut pemerintahannya. Dalam beberapa kesempatan kunjungan ke negara-negara ASEAN pada tahun 2014 dan 2015 beliau menekankan kedudukan Indonesia sebagai negara maritim sekaligus menjelaskan visi poros maritim dunia. Langkah ini dapat dipandang sebagai bagian dari langkah ofensif diplomasi. Apalagi sebelum ini gagasan semacam itu nyaris kurang disuarakan.

Beberapa kunjungan tersebut, selain berupa kunjungan kehormatan (*courtesy call*), juga berhasil menyepakati beberapa perjanjian dan komunike bersama, salah satunya adalah kesepakatan kerjasama keamanan, seperti penanggulangan penyelundupan senjata dan lalu lintas teroris, pemberantasan *illegal fishing*. Dengan dideklarasikannya Komunitas ASEAN tahun 2015 pemerintah bertekad kuat untuk terus bergerak maju menjadikan Indonesia sebagai salah satu motor pembangunan kawasan. Langkah tersebut diikuti penguatan pilar politik dan keamanan ASEAN dalam merespon berbagai tantangan internasional, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas keamanan kawasan.

Bahkan dalam kesempatan pertama mengikuti Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-25 di Nay Pyi Taw Myanmar pertengahan bulan November

2014 Presiden Joko Widodo, menegaskan tentang doktrin poros maritim yang diusung Indonesia sebagai jalan keluar untuk membangkitkan kedaulatan ekonomi dan politik bangsa. Dalam pandangan beliau, pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari negara-negara Barat ke negara-negara di kawasan Asia Timur. Perdagangan ekspor–impor yang dilakukan melalui jalur laut menurutnya akan semakin mengukuhkan arti penting pembangunan industri maritim. Jokowi menyebutkan dua samudera strategis di dunia, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Sementara Indonesia tepat berada di tengah-tengah perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Oleh karena itu, beliau menegaskan sebagai poros maritim dunia sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera utama membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menjabarkan lima langkah yang akan dilakukan. Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga dan mengelola sumberdaya laut, sehingga hasil laut Indonesia bisa dirasakan manfaatnya bagi kepentingan

rakyat. Ketiga, pengembangan infrastruktur laut dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, sistem logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, adalah diplomasi kemaritiman dengan negara lain, dan kelima membangun kekuatan pertahanan laut (<https://m.cnnindonesia.com>. diunduh pada tanggal 2 Oktober 2017 Jam. 21.42 WIB).

Deklarasi Indonesia sebagai kekuatan poros maritim dunia juga disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya dalam awal bulan November 2014 dalam KTT APEC di Beijing China, di mana pada kesempatan tersebut beliau menyerukan kerjasama dari negara-negara anggota APEC untuk membangun kawasan Asia Pasifik yang damai melalui peningkatan aktivitas ekonomi perdagangan dan juga pemanfaatan sektor kelautan. Sebagai negara maritim yang memiliki kedudukan geopolitik yang strategis, Indonesia siap bekerjasama dalam segenap aspek untuk peningkatan pembangunan nasional. Banyak peluang-peluang berusaha dan investasi yang belum dimanfaatkan di Indonesia menyangkut sektor kelautan. Karena itu pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mengundang para investor asing untuk ikut membangun kebangkitan maritim Indonesia (Swatantra Nomor 11 Tahun Iii 2014 hal 50).

Dalam pandangan pengamat militer Indonesia Connie Rahakundini Bakrie, sekiranya konsep maritim itu tidak didukung oleh negara-negara ASEAN maka Indonesia perlu bersikap tegas dengan cara keluar dari ASEAN. Sikap itu perlu ditunjukkan mengingat negara-negara ASEAN sendiri sering tidak satu suara menghadapi isu-isu luar negeri, karena sebagian di antaranya telah disetir oleh kepentingan-kepentingan lain yang mempengaruhinya. Dalam kaitan ini Indonesia tidak perlu membawa beban-beban itu kepada ASEAN karena kita sanggup memikulnya. Hal ini perlu dilakukan karena Indonesia sesungguhnya mampu untuk menjadi poros maritim dunia (Tribunnews.com 30 Juni 2016, pukul 14.02).

Langkah diplomasi maritim yang lebih kongkrit dilakukan lagi pada bulan Juli 2016 ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan Asean Ministerial Meeting ke 49 di Laos mengingatkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berkepentingan untuk meneguhkan gagasan poros maritim dunia melalui kerjasama dan dukungan negara-negara sahabat. Dalam kesempatan tersebut menteri Retno mengingatkan negara-negara ASEAN untuk terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara di luar kawasan, khususnya di bidang maritim, dengan kekuatan-

kekuatan strategik seperti: Jepang, China dan Korea Selatan yang tergabung dalam ASEAN plus Three. Karena kawasan negara-negara tersebut dan juga ASEAN telah menjadi *economic power house* dunia. Kerjasama maritim tersebut perlu dilakukan mengingat aktivitas perdagangan negara-negara tersebut banyak memanfaatkan dimensi kelautan sebagai sarana penunjang utama. Usaha peningkatan kerjasama maritim ini diintensifkan kembali dalam *East Asia Summit* (EAS) yang menyepakati dan mendukung penuh langkah-langkah Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia (Bisnis.com, 26 Juli 2016, ik 19.33 WIB). . Dalam kaitan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Timur tersebut disepakati adanya kegiatan untuk mengatasi penangkapan ikan secara liar, pengembangan pariwisata maritim, peningkatan kapasitas keamanan pertahanan laut, pemanfaatan dan pengelolaan serta eksplorasi tenaga laut terbarukan

Belakangan, usaha untuk memantapkan dukungan ASEAN kembali digemakan Presiden Joko Widodo dan juga menteri luar negeri Retno Marsudi dalam KTT APEC di Vietnam bulan November 2017 dan juga KTT ASEAN ke 31 di Manila pertengahan bulan November 2017 lalu. Hal tersebut terbukti dari hasil kesepakatan yang dilakukan antara

ASEAN-Amerika Serikat yang mana kemitraan ASEAN dan USA akan lebih difokuskan pada lima aspek bidang kerjasama, yakni, maritim, ekonomi, upaya mengatasi kejahatan transnasional, kolaborasi dengan para pemimpin ASEAN yang sedang berkembang, serta pemberdayaan perempuan. Kerjasama maritim menjadi isu penting sebab masalah kemaritiman termasuk masalah pelayaran menjadi masalah umum yang tidak biasa terutama dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan memberantas kejahatan di kawasan maritim. Kedudukan Indonesia dalam konteks ini sangat kuat sebagai negara yang memiliki wilayah lautan yang cukup luas.

Perkembangan ASEAN yang pesat telah menempatkan ASEAN sebagai motor bagi berbagai forum internasional. Pembentukan forum-forum lanjutan seperti: *ASEAN Regional Forum (ARF)* yang terdiri atas 26 negara bermanfaat untuk membahas isu-isu keamanan secara lebih terbuka. Selain itu, pembentukan Komunitas ASEAN 2015 diyakini kian memperkuat peran ASEAN dalam menghadapi berbagai perubahan arsitektur kerjasama global. Oleh sebab itu, dengan semakin signifikannya posisi ASEAN dalam kancah internasional maka penempatan ASEAN dalam orientasi kebijakan luar negeri Indonesia bermanfaat untuk meningkatkan posisi dan

daya tawar Indonesia di mata dunia internasional dalam rangka mencapai kepentingan nasional.

Selanjutnya, kedudukan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia diakui dalam kepemimpinan organisasi IORA (*Indian Ocean Rim Association*) atau Asosiasi Kerjasama Lingkar Samudera Hindia. Organisasi IORA bertujuan untuk meningkatkan pembangunan melalui kerjasama kawasan yang berfokus pada isu-isu krusial ekonomi dan sosial serta keamanan. Di bawah kepemimpinan Indonesia, periode 2015-2017 IORA berhasil mengimplementasikan sejumlah kerjasama penting menyangkut negara-negara kawasan Samudera Hindia. Dalam KTT IORA tanggal 5-7 Maret 2017 di Jakarta, disahkan *Jakarta Concord*, yakni satu dokumen strategis dan visioner tentang kerjasama dan pemetaan arah masa depan IORA. Dokumen ini memperkuat kerjasama dalam enam prioritas IORA dan mendorong kerjasama pada bidang baru, yakni, *blue economy*, pemberdayaan perempuan, dan promosi demokrasi. Selain itu, disepakati sejumlah langkah penting guna memperkuat kemitraan di kawasan, sebagai prasyarat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menuju kawasan Samudera Hindia sebagai pusat pertumbuhan baru.

Selain hal tersebut, praktek diplomasi maritim Indonesia yang

merupakan salah satu bentuk implementasi politik luar negeri Presiden Joko Widodo ditunjukkan dengan partisipasinya dalam forum-forum APEC, KTT G 20, KTT OKI, Forum-Forum multilateral, G 15 dan lain-lain. Presiden dan juga menteri luar negeri menggunakan forum-forum tersebut untuk menarik dukungan asing dalam mengkampanyekan doktrin poros maritim dunia agar diterima secara luas. Untuk mensukseskan langkah ini perwakilan-perwakilan Republik Indonesia diminta ikut mengkampanyekan gagasan tersebut pada masyarakat internasional secara lebih luas.

Pembangunan dan Pengembangan Sektor Maritim

Selain melalui tindakan ofensif diplomasi dalam politik luar negeri, perwujudan gagasan poros maritim diimbangi dengan pembangunan dan pengembangan sektor maritim. Tujuan pembangunan maritim yang utama adalah menegakkan martabat dan kedaulatan negara atas wilayah laut dan kekayaan sumberdaya di dalamnya, serta memperkokoh kesatuan antar wilayah kepulauan Nusantara. Pembangunan maritim sejatinya harus mampu mewujudkan pemerataan pembangunan antar pulau, termasuk pulau-pulau di wilayah perbatasan guna mengurangi atau bahkan menghapus disparitas

pembangunan yang mencolok antarpulau. Kebijakan kemaritiman yang diharapkan adalah menjawab seberapa persoalan terkait kepentingan ekonomi sektoral di bidang maritim, keutuhan dan kedaulatan wilayah negara, kelestarian sumberdaya dan lingkungan, serta penyelesaian konflik sosial akibat pemanfaatan ruang laut yang sama dengan kepentingan yang berbeda. Penangan berbagai masalah tersebut memerlukan kebijakan teritorial yang jelas dan tepat.

Persoalan kemaritiman memiliki dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal menyangkut pengelolaan perairan laut teritorial dan aktifitas di dalamnya untuk kepentingan dalam negeri. Sementara itu, dimensi eksternal menyangkut pengelolaan yuridiksi wilayah laut negara yang terkait kerjasama bahkan konflik dengan negara lain (Febriana 2017: 69-70). Dalam konteks dimensi eksternal pemerintah harus hadir dan bertanggungjawab terhadap resiko lingkungan yang ditimbulkan. Caranya dengan melaksanakan konservasi dan proteksi sumberdaya hayati laut, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara. Masalah kemaritiman juga bersifat terbuka dan lintas batas (*cross-border*), seperti isu lingkungan laut, pengelolaan sumberdaya hayati laut yang bermigrasi sangat jauh, pelayaran komersial dan aktifitas kepelabuhanan. Untuk merespon

berbagai persoalan tersebut, pemerintah dapat menjalankan dua model kebijakan kemaritiman.

Pertama, berbagi kekuatan (*power sharing*) secara politik dan ekonomi dengan negara-negara lain untuk mengatasi persoalan kemaritiman yang bersifat internasional. Kedua, berbagi peran dengan *stakeholder* yang meliputi organisasi supranasional, seperti: Lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, pihak swasta, dan pergerakan sosial lainnya yang ada dalam masyarakat. Sementara itu formulasi kebijakan kemaritiman dapat dikembangkan melalui pendekatan unilateral terkait dengan geopolitik dan keamanan nasional, serta pendekatan transnasional terkait kerjasama antar negara dan antar lembaga nonpemerintah. Dalam konteks inilah ada beberapa strategi yang ditempuh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencakup:

1. Penguatan Konektivitas. Upaya ini dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien dan terpadu. Konektivitas nasional menyangkut kapasitas dan kapabilitas suatu bangsa dalam mengelola mobilitas yang menyangkut berbagai unsur. Penguatan konektivitas dapat dilakukan dengan memaksimalkan SLOC (*Sea Line of*

Communication) maupun ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

2. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pesisir

Dalam perspektif ekonomi regional, wilayah pesisir memiliki pilar-pilar penting untuk menjadi kekuatan dalam membangun wilayah tersebut. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah: Pertama, *natural resources advantages*. Kedua, *economic of concentracion*. Pengembangan ekonomi lokal terutama di daerah pesisir pada prinsipnya sejalan dengan otonomi daerah.

3. Pengembangan Ekonomi Biru

Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan (laut), yang biasa dikenal dengan *Small Island Development State* (SIDS). Implementasi ekonomi biru secara global dianggap krusial mengingat 72 persen dari total permukaan bumi merupakan lautan.

4. Pengembangan Ekonomi Kelautan

Di era globalisasi yang bercirikan perdagangan dan persaingan antar bangsa yang makin sengit, segenap sektor ekonomi harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia,

Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan yang besar dan beragam. Bidang kelautan terdiri dari berbagai sektor yang dapat dikembangkan untuk memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia.

5. Pembangunan Perikanan

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan menjadikan sektor itu sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Secara teoritis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Pengembangan Armada Angkutan Laut

Wawasan pembangunan adalah wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah. Politik, dan ekonomi, sehingga untuk membangun Nusantara wilayahnya yang 75 persen adalah laut, diperlukan angkutan laut yang kuat untuk melancarkan arus masuk, barang dan jasa. Selain itu, ekspor dan impor produk memerlukan jasa transportasi yang prima.

7. Pengembangan Industri Maritim

Industri maritim merupakan salah satu industri strategis yang dipilih sebagai suatu bagian dari berbagai ujung

tombak industri berbasis teknologi dan strategi globalisasi demi melancarkan pembangunan dalam negeri dan kemajuan peranan Indonesia dalam persaingan internasional. Industri maritim Indonesia sangat berpotensi dalam menjawab tantangan masa depan dan memberi nilai tambah yang cukup tinggi untuk produk-produk transportasi laut yang dapat menghasilkan tambahan devisa ekspor/ Strategi pengembangan ekonomi sektor industri maritim diarahkan untuk membangun industri maritim yang bersih limbah, efisien, kokoh, dan mandiri, serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia didasarkan atas faktor pertimbangan faktual dan strategis. Secara faktual Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, yang dikelilingi wilayah perairan yang memiliki potensi sumberdaya amat besar untuk dikembangkan sebagai modal pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sejauh ini potensi

yang dimiliki di sektor kelautan belum tergalai dan dimanfaatkan secara maksimal.

Sedangkan secara strategis, kedudukan Indonesia sebagai negara maritim berada pada titik pertemuan dua samudera yang membentang luas, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah Indonesia terletak persis di tengah-tengah titik persilangan dunia, di mana berbagai negara memiliki kepentingan. Pengaruh-pengaruh eksternal ini memberikan dampak pada daya tahan bangsa, sehingga perlu direspon secara tepat agar kita tidak hanyut dalam arus pusaran kepentingan-kepentingan luar yang boleh jadi bertentangan dengan tujuan-tujuan nasional kita. Untuk itu penegasan sebagai poros maritim dunia adalah tepat, untuk menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa maritim.

Dalam usaha mewujudkan doktrin poros maritim dunia ada sejumlah strategi penting yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan luar negeri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini, yakni melalui diplomasi maritim, dalam bentuk, pertama diplomasi ekonomi maritim. Kedua, diplomasi pertahanan maritim. Diplomasi ekonomi maritim merupakan penegasan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara maritim dengan menempatkan sektor kelautan menjadi sentral kehidupan bangsa dalam mengembangkan segala

potensinya. Sementara diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk diplomasi untuk menghadapi ancaman tradisional dan nontradisional di kawasan maritim.

Selain itu, usaha untuk mewujudkan poros maritim dunia dilakukan melalui peningkatan kerjasama regional. Dalam konteks ini Indonesia secara intens menggalang kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, negara-negara Barat, serta negara-negara di lingkaran Samudera Hindia untuk memperoleh dukungan. Partisipasi dalam berbagai forum regional maupun internasional secara luas ini menjadi panggung politik luar negeri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut secara integral diikuti dengan Pembangunan dan Pengembangan Sektor Maritim yang mencakup: Penguatan Konektivitas; Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pesisir; Pengembangan Ekonomi Biru; Pengembangan Ekonomi Kelautan; Pembangunan Perikanan; Pengembangan Armada Angkutan Laut; Pengembangan Industri Maritim.

DAFTAR PUSTAKA

- BantartoBandoro, (Ed.). 2005. *MencariDesainBaruPolitikLuarNegeri Indonesia*, Jakarta: CSIS.
- Butcher, John G. & Elson, R.E. 2017. *Sovereignty and the Sea How Indonesia Became An Archipelagic State*, Singapore: NUS Press.
- Djoko Pramono. 2005. *BudayaBahari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dyson, S. 2006. *Personality and Foreign Policy: Tony Blair's Iraq Decisions, Foreign Policy Analysis*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Febrica, senia. 2017. *Maritime Security and Indonesia Cooperation, Interest and Strategies*, London: Routledge.
- GanewatiWuryandari. 2008. *PolitikLuarNegeri Indonesia di Tengah PusaranPolitikDomestik*, Yogyakarta: PustakaPelajar & P2P-LIPI.
- Hari Dendi. 2014. *KonektivitasPorosMaritimDuniadenganJalurSutera*, Yogyakarta: Basonta Printing Station.
- Hart, P., Stern, E.K, & Sundelius, B. (Ed.). 1997. *Beyond Groupthink: Political Group Dynamics Foreign Policy Making*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Hermann, M.G. 2003. *Assesing Leadership Style: Traits Analysis*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Ignatius Yogi WidiyantoSetyadi, “Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, terdapat dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/>. Diunduh pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 15.20.
- “Indonesia Bisa Keluar ASEAN Jika Tidak Didukung Jadi Poros Maritim Dunia”, *Tribunnews.com*. Tanggal 30 Juni 2016, pukul 14.02.
- Jervis, R. 2005. *Perception and Misperception in International Politics*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Kaarbo, I. 2002. *The Analysis of Contemporary Comparative Foreign Policies*, Washington DC: CQ Press.
- Kaarbo, J. & Hermann, M. 1998. Leadership Styles of Prime Ministers: How Individual Differences Affect the Foreign Policymaking Process, *Leadership Quarterly*, 9(3), 131-152.
- “KTT APEC 2014, Upaya Penguatan Integrasi Perekonomian Regional”, *Swatantra*, Nomor 11 Tahun 2014.
- Leifer, M. 1989. *PolitikLuarNegeri Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Leo Suryadinata. 1998. *PolitikLuarNegeri Indonesia di BawahSoeharto*, Jakarta: LP3ES.
- “Menlu Retno Ingatkan Kerjasama Maritim ASEAN Plus Three Harus Diperkuat”, *Bisnis.com*, Tanggal 26 Juli 2016, pukul 19.33 WIB.
- Ozkececi-Taner, B. 2005. The Impact of Institutionalized Ideas in Coalition Foreign Policy Making: Turkey as an Example, 1991-2002. *Foreign Policy Analysis*, 1(3), 249-278.

- “Peran Poros Maritim Dunia dalam Meningkatkan Pengaruh Indonesia di Tingkat Internasional”. *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim*. Diunduh dari www.fkpmaritim.org. tanggal 12 Februari 2017 pukul 16.22.
- “Perangi Illegal Fishing, Susi Didukung Dunia Internasional”, diunduh dari <http://www.p2hp.kkp.go.id/pada> tanggal 12 Februari 2017 pukul 15.12.
- P. Joko Subagyo. 2005. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Reid, Anthony. 1993. *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, Vol II, Yale; Yale University Press.
- _____, 1999. *Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia*, Chiang Mai: Silkworm Books.
- Rhodes, E. 1994. Do Bureaucratic Politics Matter?: Some Disconfirming Findings from the Case of the U.S. Navy, *World Politics*, 47(1), 1-41.
- Rosenau, James, N. 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*, New York: The Free Press.
- Syamsumar Dam. 2010. *Politik Kelautan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syukron Jamal,
“Mengawal Visi Poros Maritim Dunia”, diunduh dari internet. [Http://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 15.43.
- Tanty S.
Thamrin, “Kedaulatan Laut dan Konsep Poros Maritim”, diunduh dari www.academia.edu/11917693t tanggal 12 Februari 2017 pukul 15.35.
- Weinstein, F.B. 1976. *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Soekarno to Soeharto*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- Wolters, O.W. 1970. *The Fall of Srivijaya in Malay History*, New York: Cornell University.